

LAPORAN KINERJA

Lakin



KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG **BOGOR**

| 2024 |



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	5
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	11
1. Pengelolaan Kekayaan Negara	12
2. Pelayanan Penilaian	12
3. Pengurusan Piutang Negara	13
4. Pelayanan Lelang	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS	15
1. Peta Strategi	15
2. Sasaran Strategis	16
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	17
BAB III	20
AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI ANGGARAN	28
BAB IV	30
PENUTUP	30
LAMPIRAN	31

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan capaian kinerja ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas atas capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 245/KN/2020 tanggal 29 Agustus 2020.

Pada tahun 2024, KPKNL Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak kinerja KPKNL Bogor Tahun 2024 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja KPKNL Bogor ini akan dibandingkan antara realisasi pencapaian IKU Tahun 2024 dengan Kontrak Kinerja Tahun 2024, serta penjelasan terkait kendala dan permasalahan yang terjadi.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, sekaligus sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan dapat dijadikan sebagai pedoman menenrukan kebijakan serta pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Bogor, 24 Januari 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Bimo Aryo

BAB I

PENDAHULUAN

KPKNL Bogor merupakan salah satu kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dimana dalam pasal 29 dan 30 menyebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Bogor berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 312/KMK.01/2011 yang terdiri dari 5 (lima) unsur nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor yang merupakan instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban.

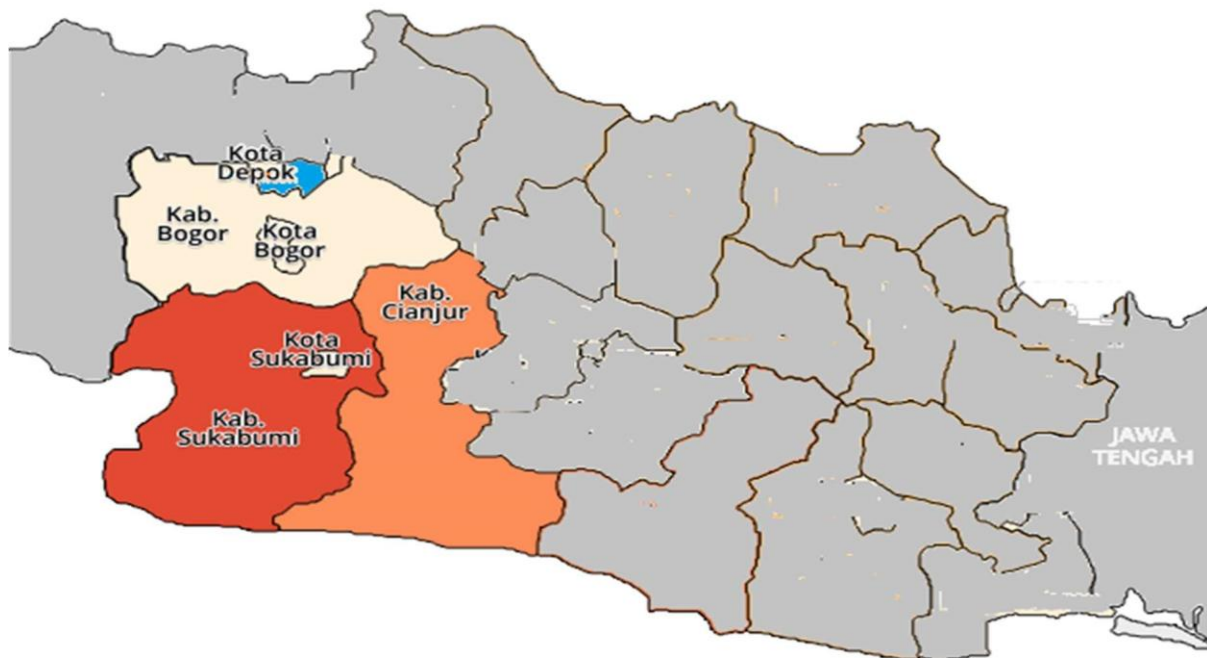
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, KPKNL Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berupaya agar tetap prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Melalui Laporan Kinerja KPKNL Bogor Tahun 2024 ini, masyarakat dapat menilai secara langsung apakah KPKNL Bogor telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas. Dan diharapkan masyarakat atau stakeholder dapat memberikan masukan kepada KPKNL Bogor demi perbaikan kinerja sehingga menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang.

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat. KPKNL Bogor berlokasi di Jalan Veteran Nomor 45, tepat berada di pusat kota Bogor yang dikenal sebagai “Kota Hujan” dan dimasa kolonial Belanda, Bogor dikenal dengan nama *Buitenzorg* yang berarti “tanpa kecemasan” atau “aman tentram”. Sejarah pendirian KPKNL Bogor berawal dari Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) Bogor dan Kantor Lelang Negara (KLN) Bogor. Kemudian KP3N Bogor dan KLN Bogor digabung menjadi Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang dan Lelang (KP2LN) Bogor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki wilayah kerja meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur.

Gambar 1.1 Peta wilayah kerja KPKNL Bogor



Sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut.

VISI

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

MISI

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat;

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor melandasi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu:

- **Integritas**
Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- **Profesionalisme**
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- **Sinergi**
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
- **Pelayanan**
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.

- Kesempurnaan

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, KPKNL Bogor juga memberi motivasi dan arah kerja kepada seluruh pegawai dengan motto "**BAGEUR**" yaitu Bersih, Amanah, Gesit, Unggul, dan Ramah. Melalui motto tersebut, diharapkan setiap pegawai KPKNL Bogor dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Adapun fungsi KPKNL Bogor sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 yaitu:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang;
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL Bogor dibantu oleh Subbagian Umum, Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, Seksi Piutang Negara, Seksi Hukum Informasi, Seksi Kepatuhan Internal serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi pada KPKNL Bogor sebagai berikut.

Gambar 1.2 Struktur Organisasi KPKNL Bogor



Tugas pokok, fungsi dari setiap jabatan yang terdapat pada KPKNL Bogor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 dijelaskan sebagai berikut:

Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL Bogor. Formasi pegawai pada Subbagian Umum terdiri dari 1 (satu) Kepala Subbagian, 6 (enam) Pegawai Pelaksana, dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara. Formasi Seksi Pengelola Kekayaan Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 5 (lima) pegawai pelaksana.

Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara. Formasi Seksi Piutang Negara terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 3 (tiga) pegawai pelaksana.

Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang. Formasi Seksi Hukum dan Informasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 6 (enam) pegawai pelaksana.

Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. Formasi Seksi Kepatuhan Internal terdiri dari 1 (satu) Kepala Seksi dan 3 (tiga) pegawai pelaksana.

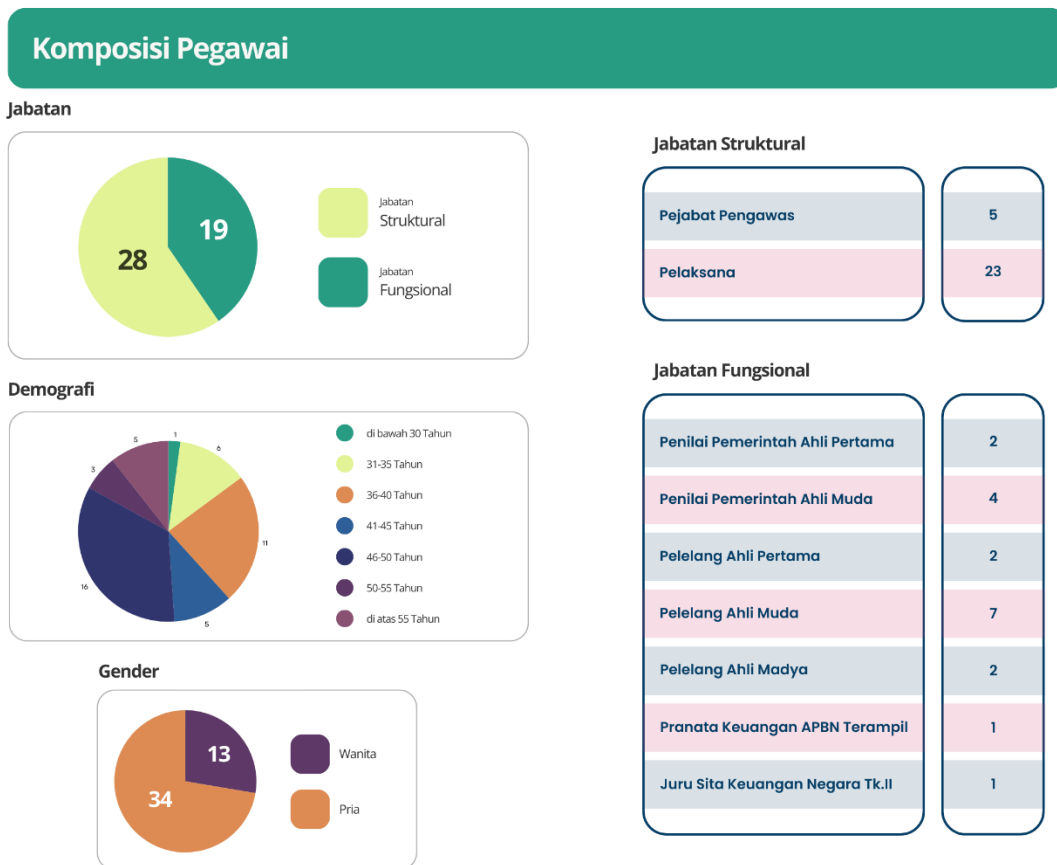
Kelompok Jabatan Fungsional

Pada KPKNL Bogor terdapat kelompok jabatan fungsional yang dibentuk sesuai kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi KPKNL Bogor sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan melalui proses pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Formasi Kelompok Jabatan Fungsional pada KPKNL Bogor terdiri dari 2 (dua) Pelelang Ahli Madya, 7 (tujuh) Pelelang Ahli Muda, 2 (dua) Pelelang Ahli Pertama, 4 (empat) Penilai Pemerintah Ahli Muda, 2 (dua) Penilai Pemerintah Ahli Pertama, dan 1 (satu) Pranata Keuangan APBN Terampil.

Jumlah pegawai KPKNL Bogor per 31 Desember 2024 sebanyak 62 Pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Kepala Kantor, 5 (lima) Kepala Seksi, 17 (tujuh belas) Pejabat Fungsional Ahli, 1 (satu) Pejabat Fungsional Terampil, 24 (dua puluh empat) Pegawai Pelaksana, dan 14 (empat belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Gambar 1.3 Komposisi SDM



Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPKNL Bogor mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan secara konsisten dengan berpedoman pada standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Bogor menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan perubahan besar terhadap tata kelola keuangan negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, dengan dilandasi oleh tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai salah satu unit vertikal DJKN, KPKNL Bogor mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang. Pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Bogor tidak hanya kepada stakeholder instansi pemerintah namun juga melayani masyarakat umum, misalnya dalam pelayanan di bidang lelang dan piutang negara. Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh KPKNL Bogor selalu diupayakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran strategis KPKNL Bogor dalam melakukan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Dalam melakukan pengelolaan kekayaan Negara, KPKNL Bogor mempunyai tugas terkait inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara serta registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan:

- Menghilangkan *high operational cost*.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengharmonisasikan ketentuan perundang-undangan kekayaan negara antarsektor.
- Mengetahui jumlah, keberadaan dan besaran nilai riil kekayaan negara.
- Tersusunnya Neraca Kekayaan Pemerintah dan Neraca Kekayaan Negara.
- Optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara.
- Mengatur pengurusan terhadap kekayaan negara, baik yang *existing* maupun *disposal*.
- Menghindari *dispute* antara instansi/unit pengelola kekayaan negara.

Salah satu lingkup pengelolaan kekayaan negara yaitu pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya sah. Dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara, dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisien, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan. Proses pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Satuan Kerja (Satker) yang berasal dari Kementerian/Lembaga yang merupakan mitra kerja KPKNL Bogor adalah sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) Satker.

2. Pelayanan Penilaian

Pelayanan Penilaian pada tahun 2024 dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap:

- a. Barang Milik Negara;
- b. barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain, dalam rangka pengurusan piutang negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal;

- c. kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara;
- d. kekayaan negara lain-lain, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara lain-lain;
- e. barang yang akan ditetapkan statusnya menjadi Barang Milik Negara;
- f. penilaian lainnya dalam rangka pengelolaan kekayaan negara.

Penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka:

- a. keperluan lelang sitaan pajak;
- b. keperluan lelang barang-barang eks tegahan kepabeanan dan cukai;
- c. pengelolaan Barang Milik Negara dan/atau kekayaan daerah;
- d. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara;
- e. pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah;
- f. pengelolaan aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya; atau
- g. pengelolaan aset sitaan Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penilaian, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah menggunakan analisis sesuai prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik (*The Highest and The Best Use*), analisis kelayakan bisnis dan analisis pasar properti, sehingga Penilai DJKN menghasilkan nilai yang akurat dan akuntabel. Dari uraian tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Penilai DJKN mempunyai peran yang strategis dalam mendukung Pengelolaan Kekayaan Negara yang akuntabel.

3. Pengurusan Piutang Negara

Pengurusan piutang negara mempunyai peran strategis untuk melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun. Peran ini sangat mendukung peran strategis DJKN sebagai *revenue center* dari sisi biaya administrasi maupun pengurusan penagihan piutang negara.

4. Pelayanan Lelang

Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Penjualan melalui lelang memberikan keuntungan bagi pihak masyarakat, instansi-instansi yang



membutuhkan yang mungkin berbeda dari sisi keperluan maupun pemerintah. Bagi Masyarakat, penjualan melalui lelang memberikan jaminan kepastian hukum atas barang-barang yang dibeli serta mendapatkan transaksi yang transparan dan efisien. Bagi instansi atau badan-badan usaha yang dilayani memberikan media untuk mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat dengan harga yang maksimal, dengan tersedianya dana maka akan memperlancar arus lalu lintas perekonomian negara. Di samping itu, bagi pemerintah, lelang juga memiliki fungsi *budgeter* untuk mengumpulkan penerimaan negara khususnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk bea lelang, PPh dan BPHTB guna membiayai tugas-tugas pemerintah dan pembangunan. Dengan demikian, pelayanan lelang mempunyai peranan yang sangat strategis karena merupakan salah satu sumber dari penerimaan negara.

BAB II

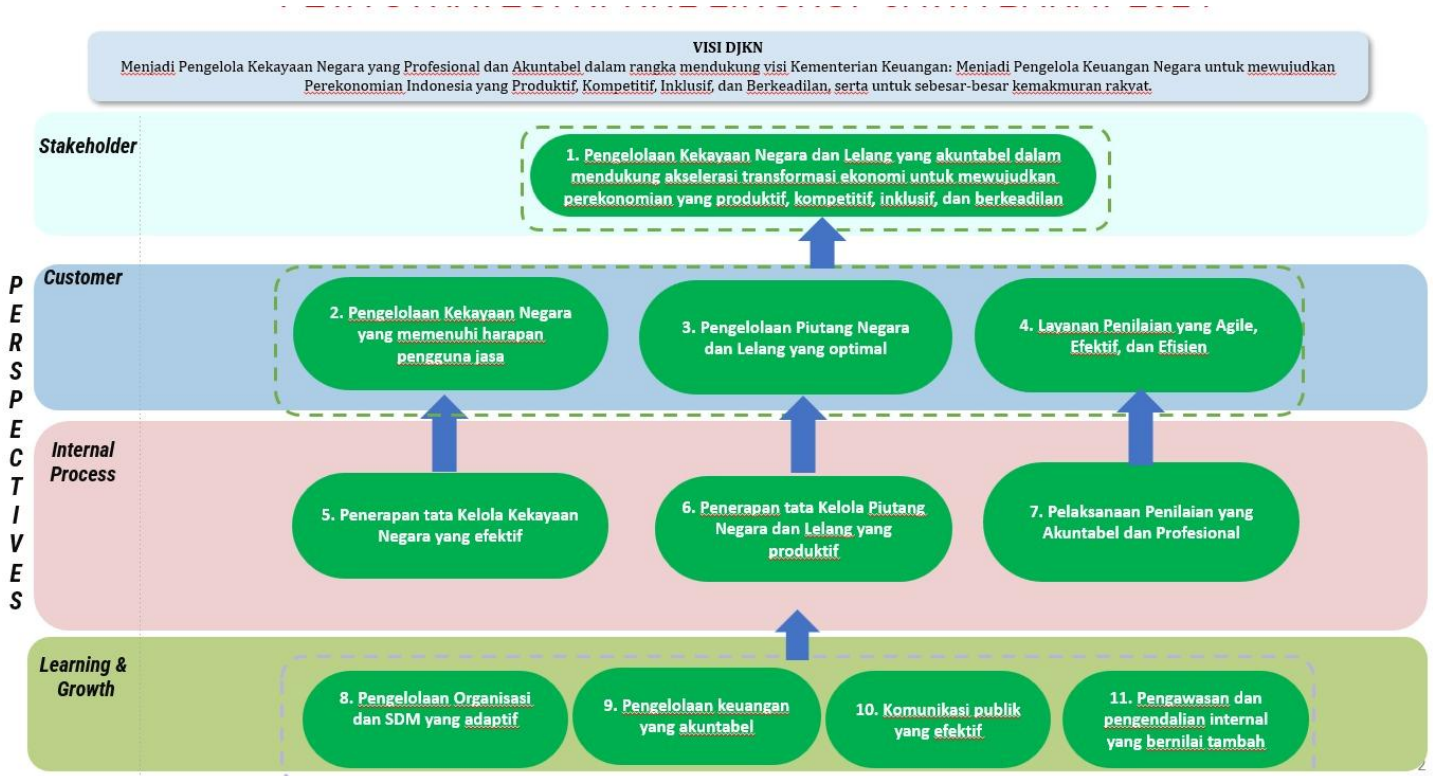
PERENCANAAN KINERJA

A. PETA STRATEGI DAN SASARAN STRATEGIS

1. Peta Strategi

Perencanaan kinerja KPKNL Bogor dituangkan dalam bentuk Kontrak Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat dan Kepala KPKNL Bogor. Penandatanganan Kontrak Kinerja merupakan cerminan dari kesanggupan untuk meraih dan melampaui target yang telah ditetapkan serta menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan KPKNL Bogor sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir tahun.

Gambar 2.1 Peta Strategi KPKNL Bogor



Peta strategi KPKNL Bogor terdiri dari 4 (empat) perspective yaitu:

1) *Stakeholder Perspective*

Perspective yang berkaitan dengan stakeholder KPKNL Bogor dan untuk mengetahui kinerja KPKNL Bogor yang paling utama/pokok. *Stakeholder perspective* terdiri dari 1 (satu) sasaran

strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselesari Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.

2) *Customer Perspective*

Perspective yang berorientasi kepada pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor adalah dalam rangka memenuhi keinginan atau kebutuhan pengguna jasa. *Customer perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa, Pengelolaan piutang negara dan Lelang yang optimal, dan layanan penilaian yang agile, efektif dan efisien. Pelanggan atau pengguna jasa KPKNL Bogor yaitu Satuan Kerja K/L, Penyerah Piutang, Pemohon Lelang dan Pembeli Lelang.

3) *Internal Process Perspective*

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan kepada *customer* dan *stakeholder*. *Internal process perspective* terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu penerapan tata Kelola kekayaan negara yang efektif, penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif, serta pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan profesional.

4) *Learning and Growth Perspective*

Merupakan sumber daya internal KPKNL Bogor yang dimiliki sebagai modal untuk untuk melaksanakan kegiatan organisasi. *Learning and growth perspective* terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif, pengelolaan keuangan yang akuntabel, komunikasi publik yang efektif, serta pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Kontrak Kinerja Kemenkeu Three KPKNL Bogor Tahun 2024 terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. Adapun Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Bogor berjumlah 11 (sebelas), yaitu:

- 1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkeadilan
- 2) Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

- 3) Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal
- 4) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien
- 5) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif
- 6) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif
- 7) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional
- 8) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
- 9) Pengelolaan keuangan yang akuntabel
- 10) Komunikasi publik yang efektif
- 11) Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut di atas, telah ditetapkan indikator atau tolak ukur keberhasilan pencapaiannya yaitu berupa Indikator Kinerja utama (IKU). IKU Kemenkeu Three KPKNL Bogor yang ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. Antara Sasaran Strategis dengan IKU terdapat keterkaitannya, yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Daftar IKU KPKNL Bogor Tahun 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Indeks Integritas	10	20	20	30	30	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN	10%	50%	50%	60%	60%	72%	72%

	dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	10%	45%	45%	60%	60%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	20	40	40	60	60	100	100
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BPKN)	96%	90%	90%	81%	81%	81%	81%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	60%	60%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							

7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	78%	78%	90%	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
11b-N	Indeks Efektivitas UKI	5	15	15	20	20	82	82
11a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	97%	97%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Perbandingan antara target IKU dengan realisasi IKU pada masing-masing perspektif diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bogor tahun 2024 adalah sebesar 115,53% (seratus lima belas koma lima puluh tiga persen).

Kinerja KPKNL Bogor tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini nampak adanya peningkatan NKO dari 113,13% (tahun 2023) menjadi 115,53% (tahun 2024). Selama tahun 2024, KPKNL Bogor memiliki 19 (Sembilan belas) IKU dan pada akhir tahun seluruh IKU status hijau.

Secara keseluruhan, Capaian Kinerja IKU Kemenkeu-Three KPKNL Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian IKU KPKNL Bogor Tahun 2024

Seksi PKN, PN dan JF Pelelang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	136.87	259.96	256.96	154.68	154.68	192,06		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi	
Target Total	: Rp 57.205.000.000
PKN	: Rp 25.975.000.000
PN	: Rp 51.000.000
Lelang	: Rp 31.179.000.000
Realisasi s.d. Desember 2024	: Rp 97.367.037.748 (167.82% terhadap target tahunan)
PKN	: Rp 49.887.967.336 (+ 24 miliar)
PN	: Rp 75.449.390 (+ 24 juta)
Lelang	: Rp 47.403.621.022 (+ 16 miliar)



Seksi KI	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel Dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	20	20	30	30	89.17		
Realisasi	10	20	20	42	42	100		
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	112.15%		

Isu Utama dan Implikasi

- Indeks Integritas s.d. Q3 2024 mendapat nilai 42.

Seksi PKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	50	50	60	60	71,5	71,5	
Realisasi	10	81.78	81.78	85.69	85.69	87,66		
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Target Q4:

Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan: 71.5

Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya: 71.5

Realisasi s.d. Desember 2024

Hasil Pengukuran Target NUP/Objek BMN Tahun Berjalan: 93.19

Hasil Optimalisasi NUP/Objek BMN Pelaksanaan sebelumnya: 71.05

Seksi PKN	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	45	45	60	60	86,5	86,5	
Realisasi	10	56.2	56.2	86.30	86.30	100		
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	115.61%		

Isu Utama dan Implikasi

Target Q4: 86.5%

Realisasi s.d. November 2024: 100%

- Jumlah tindak lanjut persetujuan/penetapan pengelolaan BMN : 146

- Jumlah persetujuan/penetapan pengelolaan BMN yang diterbitkan : 146



Jafung Pelelang	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	62,59	86.22	86.22	90.37	90.37	125.69		
Capaian	62,59%	86.22%	86.22%	90,37%	90,37%	120%		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan PL Kelas I : Rp726.669.000.000 Pegadaian : Rp227.150.000.000 Jumlah target : Rp953.819.000.000</p> <p>Realisasi s.d. Desember 2024: PL Kelas I : Rp967.670.557.319 Pegadaian : Rp231.239.951.700 Jumlah Realisasi: Rp1.198.910.509.019 (125,69% terhadap target tahunan)</p>

Seksi PN	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal							
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	701.02	179.11	179.11	133.05	171	113.76		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	113.76%		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target Tahunan : Rp 6.770.800.000</p> <p>Realisasi s.d. Desember 2024: Rp 7.702.396.301 (113.76% terhadap target tahunan)</p>

Jafung Penilai Pemerintah	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	
Realisasi	113.35	109.10	109.10	109.34	109.34	109.08		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Realisasi sudah tercapai dengan baik.</p>



Seksi PKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	20	40	40	60	60	100	100	
Realisasi	20	102.29	102.29	312.11	312.11	207.47		
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan
 Target : 100%
 1.004 bidang
 K1 : 818; K2 : 51; K3 : 127; K4 : 8

Realisasi s.d. Desember 2024: 2.083 bidang
 K1 : 643; K2 : 572; K3 : 789; K4 : 79

Seksi PKN	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	32	32	80	80	100	100	
Realisasi	20	65.74	65.74	96.17	96.17	125.74		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Target Tahunan : 92 NUP dan 5 Paket

Realisasi s.d. Desember 2024 :
 Realisasi Evaluasi 117 NUP
 Realisasi Rekomendasi 6 Paket (Satker PN Sukabumi, Kejari Kota Sukabumi, Kantah Kota Sukabumi, BBPAT Sukabumi, PA Sukabumi).

Seksi PN	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Saldo Outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	96	90	90	81	81	81	81	
Realisasi	94,61	89.90	89.90	88.72	88.72	77.27		
Capaian	101,45%	100,11%	100,11%	98,97%	98,97%	104,18%		

Isu Utama dan Implikasi

Data Awal per 31 Des 2023 : 594 BKPN

Target Tahunan :
 479 BKPN

Realisasi s.d. Desember 2024 :
 459 BKPN



Jafung Pelelang	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif							
	Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	30	45	45	60	60	89	89	
Realisasi	57.25	87.55	87.55	101.62	101.62	131.47		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Persentase Produktivitas Lelang s.d. Desember 2024 sangat baik.

Jafung Penilai Pemerintah	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	16	16	16	16	16	16	16	
Realisasi	0	0	0	0	0	0		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian sangat baik

Subbagian Umum	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	60	60	78	78	90	90	
Realisasi	19.09	80.11	80.11	107	107	119.60		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat 40 JP (atau lebih 40 JP) : 46 orang dari total 46 orang Pegawai.

Terdapat juga kegiatan yang harus dilakukan yaitu terkait Bintel yang meliputi 4 aspek:

- Ideologi : Sudah dilaksanakan
- Rohani : Sudah dilaksanakan
- Kompetensi : Sudah dilaksanakan
- Kejiwaan : Sudah dilaksanakan



Subbagian Umum, Seksi KI	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85		
Realisasi	100	98.61	98.61	100	100	99.58		
Capaian	117.65	116.01	116.01	117.65	117.65	117.15		

Isu Utama dan Implikasi

Berkas-berkas yang diminta Kanwil DJKN Jawa Barat untuk triwulan III telah dikirimkan semuanya pada Bulan September 2024, seperti rapat DKO, NKO, dll. Hasil reuiu kantor pusat DJKN, KPKNL Bogor memperoleh nilai 100 untuk manajemen kinerja dan manajemen risiko.

Jafung Pranata Keuangan	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	105.27	105.27	120	120	120		
Capaian	100	120%	120%	120	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Target Tahunan: 100

Realisasi s.d. Desember 2024: 120

Sejauh ini penyerapan anggaran masih on the track terhadap perencanaan.

Subbag Umum dan Seksi HI	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	Persentase Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	10	10	10	10	10	10	10	
Realisasi	0	0	0	0	0	0		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi

Target : 10%

Realisasi : 0% --> melebihi target.



Seksi HI	Komunikasi Publik Yang Efektif							
	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	
Realisasi	80	100	100	100	100	100		
Capaian	100%	120%	120%	120%	120%	120%		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Target : 80 Realisasi : 100</p> <p>Triwulan IV (Target Pemutakhiran 6 Informasi Publik)</p> <p>Daftar Informasi Publik Tersedia Setiap Saat</p> <p>A. Seluruh informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (jika terdapat pemutakhiran)</p> <p>B. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMK Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan - PMK Nomor 152/PMK.01/2022 tentang perubahan atas PMK Nomor 196/PMK.01/2019 tentang Pedoman Kearsian di Lingkungan Kementerian Keuangan - PMK Nomor 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dala Jabatan dan Peringkat bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan - PMK Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

Jafung Pelelang	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Indeks Efektivitas UKI							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	5	15	15	20	20	82	82	
Realisasi	5	15	15	20	20	100		
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	120%		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Indeks Efektivitas UKI akan diperhitungkan pada Triwulan IV 2024.</p> <p>Indeks akan diberikan langsung oleh Kantor Pusat DJKN.</p>

Nama Unit	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	35	40	40	60	60	97		
Realisasi	75	95	95	95	95	100		
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	103%		

Isu Utama dan Implikasi
<p>Realisasi s.d. November 2024: 16 temuan telah ditindaklanjuti dari total 20 temuan.</p> <p>Total temuan PN: 11 temuan 10 temuan tuntas</p> <p>Total temuan PKN: 9 temuan 9 temuan tuntas.</p>

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Realisasi		
		2024	2023	2022
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan			
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	141,75%	120,92%	139%
1b-CP	Indeks Integritas	92,44	89,17	-
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	87,66%	73,17%	73,17%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN	115,61%	106,31%	85%
3	Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal			
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	125,25%	101,85%	101,85%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	113,76%	117,12%	117,12%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	109,08	-	-
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif			
5a-CP	Persentase BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	207,47%	171,24%	171,24%
5b-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	125,74%	133,40%	133,40%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif			
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	77,27%	105%	105%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	131,47%	128,47%	32%

7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional			
7a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	0%	0,40%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	119,6%	115%	114%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	99,58	-	-
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel			
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	120%	116,02%	95,87%
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	0%	0%	0%
10	Komunikasi publik yang efektif			
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	100	-	-
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
11b-N	Indeks Efektivitas UKI	98,79	-	-
11a-N	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%

B. REALISASI ANGGARAN

Tahun Anggaran 2024 KPKNL Bogor mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 5.192.560.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebagai berikut:



Kegiatan	Pagu	Realisasi	Presentase
Belanja Barang	3.411.348.000	3.147.490.468	92,26
Belanja Modal	1.781.212.000	1.717.183.026	96,4
Belanja Pegawai	-	-	-
Total	5.192.560.000	4.864.673.494	93,68

*) Sumber data realisasi tersebut diambil dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara).

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, tingkat pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BOGOR pada tahun 2024 secara umum dapat dikatakan sangat baik dengan capaian kinerja keseluruhan (Nilai Kinerja Organisasi/NKO) sebesar 115,53% dengan katagori sangat baik.

Tabel 4.1 Capaian KPKNL Bogor Tahun 2024

Perspective	Bobot	Nilai
Stakeholder	30%	33,16%
Customer	20%	23,65%
Internal Process	25%	29,34%
Learning and Growth	25%	29,38%
NKO		115,53%

Dalam mencapai target kinerja, KPKNL Bogor menghadapi banyak tantangan, kendala dan permasalahan. Hal tersebut dapat dilalui dengan segala upaya dan rencana aksi yang telah dilaksanakan sehingga realisasi capaian kinerja dapat melampaui targetnya. KPKNL Bogor juga berhasil memperoleh berbagai prestasi dan penghargaan selama tahun 2024.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini disusun dan semoga dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholder* KPKNL Bogor. Saran, kritik, dan masukan yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Bogor di masa yang akan datang. Pada akhirnya, KPKNL Bogor belum berpuas diri atas capaian yang sudah ada dan akan terus berusaha melakukan upaya perbaikan diri terutama dalam hal peningkatan pelayanan terhadap *stakeholder*.

LAMPIRAN

Daftar Penghargaan yang Diraih KPKNL Bogor pada Tahun 2024

No	Kategori Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan
1.	Satker dengan Peringkat 10 Terbaik atas Capaian IKPA dengan 8 indikator	KPPN Bogor	KPKNL Bogor
2.	Peringkat Kedua Capaian NKO di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2023	Kanwil DJKN Jawa Barat	KPKNL Bogor
3.	Satker Terbaik dengan Capaian Nilai IKPA 100 Periode tahun 2023	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	KPKNL Bogor
4.	Satker dengan Nilai IKPA Sempurna pada 7 indikator dengan bobot 100% periode Semester I Tahun 2024	KPPN Bogor	KPKNL Bogor
5.	Satker dengan Implementasi Transaksi non Tunai kategori transaksi digipaysatu periode Semester I Tahun 2024	KPPN Bogor	KPKNL Bogor
6.	Dukungan untuk Mewujudkan Tata Kelola Aset Perusahaan yang Baik	PT Sejahtera Eka Graha	KPKNL Bogor







